

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh negara-negara, individu-individu atau organisasi-organisasi yang melewati batas-batas wilayah atau teritori nasionalnya. Negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional dan dalam hal ini sebagai aktor utama menurut realis harus melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan negara dalam memenuhi semua kebutuhannya dan kepentingannya secara mandiri yang dikarenakan oleh keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu setiap negara didunia ini membutuhkan suatu bentuk kerjasama dengan negara lainnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Adapun negara itu sendiri adalah merupakan bentuk tertinggi dari suatu organisasi manusia, yang mana tidak mengakui adanya suatu kekuatan yang lebih tinggi darinya, sehingga dengannya maka negara mempunyai kedaulatan penuh dalam mengatur dirinya. Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* mengatakan bahwa negara adalah suatu kumpulan atau masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan diorganisir secara politik dibawah suatu pemerintahan.¹

¹ Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas 1998. Hal 55

Munculnya kebijakan luar negeri Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Putin yang dipengaruhi oleh faktor idiosinkretik jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan presiden Iran lainnya, maka hal ini menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan alasan berikut :Pertama, adanya keinginan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Militer Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Putin. Kedua, Adanya keinginan penulis untuk mengetahui dan mempelajari motivasi Rusia memveto draft resolsusi PBB untuk intervensi militer ke Suriah. Vladimir Putin merupakan pemimpin yang sangat langka di dunia internasional pada saat ini yang secara terang-terangan menyatakan keberaniannya untuk menyatakan ketidaksetujuannya pada Barat, oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul:

“Apa motivasi Rusia memveto draft resolusi PBB untuk intervensi militer ke Suriah?”

B. Latar Belakang Masalah

Hubungan Rusia-Suriah telah terbentuk setelah peristiwa pengusiran penasihat militer Uni Soviet oleh Mesir pada tahun 1972. Akibat putusnya hubungan dengan Mesir, Rusia (Uni Soviet waktu itu) semakin mengandalkan Suriah yang diperintah partai sosialis Baath untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Peralatan militer Uni Soviet semakin mengalir banyak ke Suriah saat itu. Uni Soviet juga menjadi jaminan bagi dukungan politik Suriah di pentas internasional.

Banyak pihak yang terlibat di dalam krisis Suriah. Liga Arab, Turki, Kanada, PBB, negara-negara Eropa, Amerika Serikat, China, dan lain-lain memiliki kaitan dengan apa yang terjadi di Suriah saat ini dan berdiri di atas kepentingan mereka masing-masing. Beberapa memiliki singgungan kepentingan sehingga bersatu dalam gerakan dan beberapa berdiri sendiri sehingga harus berjuang tanpa kawan. Namun, yang menarik adalah keterlibatan Rusia dalam kasus Suriah. Dalam, perspektif hubungan internasional, akan banyak hal-hal yang dapat dibahas. Dari segi politik masing-masing negara, akan memberikan informasi dan pemahaman yang menarik.

Rusia (bersama China) merupakan aliansi terkuat dari Suriah. Sepak terjang Rusia tidak hanya terbatas dalam forum PBB atau meja perundingan untuk membicarakan masa depan Suriah dan rezim Assad yang dituntut dunia untuk meletakkan jabatannya. Terhitung dari tahun 2006 hingga 2011 dan awal 2012 ini, ekspor senjata dari Rusia ke Suriah telah meningkat sebanyak 600%.² Kedua negara terlibat kerjasama dalam masalah keamanan negara. Selain itu, Suriah juga menyediakan pijakan bagi Rusia dengan terdapatnya pangkalan militer Rusia di kota Tartus yang strategis. Suriah ibarat mercusuar bagi Rusia menyebar pengaruh politiknya di wilayah Timur Tengah.³ Hal ini ditandai dengan semakin membesarnya aliansi anti AS dan Barat di wilayah itu.

² “Putin: Obama harus Buktikan Senjata Kimia Suriah”, dalam <http://internasional.kontan.co.id/news/putin-obama-harus-buktikan-senjata-kimia-suriah>, diakses pada 10 Januari 2014

³ Kistyarini, “72 Persen Senjata Suriah Diimpor dari Rusia,” dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/03/19/12043477/72.Persen.Senjata.Suriah.Diimpor.dari.Rusia>, diakses pada 20 Juli 2013

Ada tidaknya pengaruh keterlibatan Rusia terhadap krisis di Suriah tergambar ketika Rusia akan mengadakan pemilihan umum. Pada 4 Maret 2012, rakyat Suriah pro rezim Assad turun dan mendatangi kedutaan Rusia di Suriah. Mereka menyampaikan dukungan dan harapan untuk terpilihnya Vladimir Putin dalam pemilihan umum.⁴ Dukungan ini datang karena Putin dianggap memberi perhatian terhadap Suriah di saat Suriah diasingkan dari pergaulan dunia. Rusia tetap setia bertahan mendukung dan mermbantu Suriah.

Dalam konteks Suria ini, kemenangan diplomasi Putin adalah keinginan publik dunia untuk mengutamakan jalur diplomasi dan perundingan dibandingkan dengan intervensi militer internasional adalah prestasi luar biasa yang didapat oleh Putin dalam upayanya memperbaiki pengaruh politik dan ekonomi Rusia di dunia pasca runtuhnya pemerintahan komunis pada tahun 1991. Selain untuk modal politik Putin untuk bertanding dalam pemilihan presiden Rusia, Suriah juga penting untuk modal politik Rusia di Timur Tengah yang menghasilkan sepertiga produksi minyak dunia.⁵

Dalam menyikapi isu Suriah, Rusia lebih condong untuk penyelesaian konflik secara damai melalui perundingan antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Rusia berperan dalam menggalang opini untuk melakukan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik Suriah. Rusia juga beberapa kali memveto resolusi yang diindikasikan akan digunakan oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat untuk mengucilkan Suriah di pentas politik dunia. Dampak

⁴ "Vote for Putin: pro-Assad Syrians tell Russians", <http://www.vanguardngr.com/2012/03/vote-for-putin-pro-assad-syrians-tell-russians/>, diakses pada 15 Mei 2013.

⁵ "Permintaan Minyak Dunia Naik", dalam <http://koran-jakarta.com/?3686-permintaan%20minyak%20dunia%20naik>, diakses pada 10 januari 2014

peran penting yang dimiliki oleh Rusia saat ini dalam proses penyelesaian krisis telah membuat posisi Rusia dalam politik internasional semakin penting.⁶

Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia berdiri di belakang Suriah dan siap mematahkan setiap usaha negara-negara Barat dan AS yang berambisi untuk menundukkan dunia. Hal ini ditunjukkan dengan upaya Rusia untuk terus menanamkan usaha-usaha secara diplomatik di forum-forum internasional maupun secara militer guna menjaga pengaruh Rusia di Kawasan Timur Tengah dan kancah internasional. Sehingga perimbangan kekuasaan atau *balance of power* di level dunia tetap terjaga.

Oleh karena Rusia sendiri sudah melihat tangan Washington di Suriah dalam konflik dengan Iran. Amerika telah memimpin operasi militer di Suriah dengan Turki, Qatar, dan Arab Saudi di sebuah pusat kendali di Adana sekitar 60 kilometer dari perbatasan Suriah, yang juga menjadi pangkalan udara Amerika di Incirlik. Rusia tanpa ragu mengingatkan Amerika Serikat dan Eropa bahwa hubungan mereka dengan para ekstrimis muslim adalah permainan yang sangat berbahaya.

Rusia meyakini bahwa logika memperjuangkan kemanusiaan dalam intervensi militer internasional adalah salah arah. Hal itu semata-mata dibuat oleh AS dan Baratnya yang selalu ingin menumbangkan kekuasaan pemerintahan Suriah saat ini yang bertolak belakang dengan gaya dan kemaun AS dan Barat. Putin dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Rusia adalah menekankan penyelesaian krisis Suriah semaksimal mungkin dan hal itu hanya

⁶ Henry Meyer, 2012, *Putin Pins Hope on Syria Cease-Fire to Combat U.S. Supremacy*, dalam <http://www.bloomberg.com/news/2012-04-20/putin-pins-hope-on-syria-cease-fire-to-combat-u-s-supremacy-1-.html>, diakses pada 15 Mei 2013.

dapat diselesaikan oleh rakyat Suriah sendiri. Masyarakat Suriah yang dapat memutuskan masa depan terbaik untuk mereka. Merekalah yang memutuskan siapa yang berhak dan berkualitas untuk memerintah di Suriah.

Berdasarkan perpektif yang dimiliki Rusia, maka Rusia menolak berbagai upaya dari pihak luar yang dianggap memaksakan kehendaknya dalam menyelesaikan krisis Suriah. Oleh karena itu, dalam menyikapi resolusi yang diprakarsai oleh PBB tentang penyelesaian krisis Suriah, Rusia bersikap menolak. Resolusi tersebut secara spesifik ditulis bahwa Suriah akan dijatuhi sanksi bila tidak menarik persenjataan berat dari berbagai kota dalam kurun 10 hari

Tindakan Rusia menggunakan hak veto tersebut dilihat sebagai bentuk dukungan yang besar terhadap Suriah, khususnya selama unjuk rasa anti rezim Presiden Bashar Al-Assad pada awal tahun 2011. Penolakan Rusia ini dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghentikan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia ingin menunjukkan kepada Barat, khususnya Amerika Serikat tidak bisa bergerak semena-mena secara sepihak melalui rancangan resolusi atas nama PBB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Apa motivasi Rusia memveto draft resolusi PBB untuk intervensi militer ke Suriah?”

D. Kerangka Berpikir

Penyusunan kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan.⁷

- Teori Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan konsep yang selalu digunakan untuk melakukan hubungan internasional antar negara dalam merefleksikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk merumuskan sikap apa yang sebaiknya diambil suatu negara untuk mencapai kepentingannya dalam tataran bilateral, multilateral, regional, bahkan global. Keputusan politik luar negeri yang dirumuskan dalam kebijakan ini pun terkadang menjadi ancaman bagi negara lain karena merasa terancam.

Kepentingan nasional sendiri yang merupakan panduan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri, secara harfiah jika kita menggunakan pendekatan realis atau neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara sebagai unitary aktor yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut.

⁷ Suriasumantri, Jujun. 1993. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 128

Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain itu negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya (*territorial integrity*) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Dengan demikian ada perbedaan antara kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan ada juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya. Kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu tetapi tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.⁸

Penulis mengambil definisi Kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) dari James N. Rossenau yang memeberikan definisi bahwa kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.⁹ Kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangungan hidup suatu negara.¹⁰ Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang

⁸ Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 67-69.

⁹ James N. Rossenau, Garvin Boyd, Kennet W Thompson, *World Politics : An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal.27

¹⁰ *Ibid.*, hal. 32

mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipresepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.¹¹

Politik luar negeri suatu negara adalah kelanjutan dari politik dalam negeri. Suatu kebijakan dalam politik luar negeri diambil untuk kepentingan dalam negeri juga. Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa; "*foreign policy begins domestic policy ends*".¹² Dengan kata lain politik luar negeri dapat dikatakan berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Menurut kamus hubungan internasional, politik luar negeri merupakan: strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.¹³

Interaksi dari hubungan internasional antarnegara diwujudkan dalam pelaksanaan politik luar negeri dimana politik luar negeri suatu negara cenderung dinamis karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan startegis (baik domestik

¹¹ Jamaes N Rossenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 173

¹² Wolfram F. Henrieder, *Compatrative Foreign Policy: Theoretical Essays*. New York: David McKay Co., 1971, hal 22

¹³ Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamas Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Group, 2005, hal.48

maupun internasional) dan status negara yang bersangkutan, apakah ia negara kecil atau negara besar. Adapun pengertian dari politik luar negeri tersebut adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara lain.¹⁴ Dalam hal ini politik luar negeri merupakan suatu kebijakan negara yang ditujukan kepada negara lain ataupun aktor non state dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam kasus Suriah pergolakan politik Luar negeri yang terjadi membuat dinamika-dinamika internasional yang mempengaruhi kebijakan *Stake Holders* Negara-negara, terutama Negara Pemilik Hak Veto. Negara-negara yang memiliki hak veto memiliki pendapatnya masing masing tentang krisis di Suriah. Amerika Serikat adalah salah satu yang *concern* di bidang ini dan mengecam kekerasan yang terjadi di Suriah dengan berbagai upaya diplomatik yang dilancarkan. Kebijakan Amerika dan Barat menekan Bashar al-Assad agar menyerahkan tampuk kekuasaan Negara itu ke tangan oposisi. Hal tersebut memunculkan reaksi Rusia dan Cina karena keduanya memiliki kepentingannya tersendiri di Suriah. Rusia dan Cina sama-sama terancam kepentingannya apabila oposisi menggantikan posisi Bashar al-Assad yang dikenal sebagai sekutu tradisional Rusia.

Ketika perang saudara meletus di Suriah, banyak sekali kecaman yang terjadi di berbagai belahan dunia. AS dan sekutunya secara terang-terangan

¹⁴ K.J Holsti, M. Tahir Azhary, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis Edisi Keempat Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 107

menekan Rezim di Suriah juga mengancam kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan kepada presiden Suriah. Di samping itu, Rusia juga terus menjalankan diplomasi internasional sebagai penyeimbang kekuatan mainstream yang dikomando AS. Ketika Amerika mengusulkan berbagai resolusi yang berisi sanksi dan tindakan militer kepada Suriah, Rusia tetap menolak dan membela rezim Assad. Rusia melakukan berbagai cara guna mensukseskan agenda-agendanya dalam kasus Suriah

Menyikapi kekuatan Barat dan Arab yang menekan rezim Suriah serta ancaman tindakan militer ke Negara Arab itu, Rusia menganggap bahwa Intervensi dari luar Negara ini hanya akan membuat situasi semakin tak menentu. Rusia menganggap dengan membiarkan mereka menentukan Politik dalam negeri mereka akan membuat situasi secara perlahan akan damai kembali. Terhitung Rusia menolak semua resolusi yang menyudutkan Suriah. Kebijakan luar negeri Rusia dengan tegas membela tindakan-tindakan yang menyudutkan pemerintah Bashar al-Assad. Kebijakan politik luar negeri Rusia selama selama perang saudara di Suriah kokoh membela kepentingan-kepentingan rezim Bashar al-Assad. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda politik Rusia sejak pertama kali perang meletus. Kebijakan luar negeri Rusia berorientasi pada kepentingan geopolitikny yang dijaga sejak naiknya al-Assad senior.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan guna memberikan gambaran bagi penulis terhadap penelitian yang dilakukan, khususnya dalam proses pengumpulan data serta untuk memudahkan proses

pengambilan kesimpulan terhadap penelitian ini, maka suatu hipotesis sangatlah dibutuhkan. Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Motivasi Rusia memveto draft resolusi PBB untuk intervensi militer ke Suriah yaitu Rusia ingin menjaga pengaruh serta kehadiran militer Rusia di Timur Tengah tetap terjaga. Suriah sebagai sekutu tradisional mendukung kepentingan geopolitik Rusia di Timur Tengah, khususnya dan dunia pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan konsep deskriptif analitis. Penulis akan memaparkan data-data dan teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, kemudian dengan konsep dari teori yang telah dipaparkan, data-data tersebut akan dianalisa dengan data-data lain yang mendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, media massa, data-data dari berbagai macam website, serta dari berbagai sumber yang mempunyai keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan ini adalah ketertarikan penulis tentang Hubungan antara Rusia dan Amerika dalam kasus Suriah. Terlepas dari itu alasan utama pemilihan judul ini adalah untuk sebagai gambaran awal dan sebagai tambahan pengetahuan tentang teori yang telah didapat penulis semasa kuliah. Serta tujuan akhir dari tulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dan implementasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh penulis dibangku kuliah

yang juga akan dijadikan Skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar dalam menganalisa permasalahan lebih tajam dan terfokus. Jangkauan waktu penelitian ini adalah pada saat krisis ini pertama muncul hingga perkembangannya pada tahun 2012 karena tahun tersebut merupakan tahun awal pecahnya pemberontakan yang terjadi di Suriah, sampai dengan tahun 2014, tahun terakhir sebelum perang di Suriah berubah menjadi Arena pertarungan yang lebih besar dikarenakan pendudukan ISIS dari Irak ke sebagian Negara Suriah, Namun, tidak menutup kemungkinan, untuk mendukung data penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan data-data dan informasi dari tahun-tahun sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan/organisasi penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penyesuaian dengan proses pembahasan yang dibutuhkan. Sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Politik Luar Negeri Rusia dan Sejarah Hubungan Rusia-Suriah

Bab ini menjelaskan tentang politik luar negeri Rusia secara umum baik menyangkut prinsip maupun kebijakan yang diterapkan selama ini

BAB III : Sikap Rusia Terhadap Resolusi PBB

Bab ini menjelaskan tentang sikap Rusia dalam menanggapi resolusi yang diajukan oleh Negara-negara Barat dan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik Suriah.

BAB IV : Kepentingan Rusia Memveto Resolusi PBB

Pada Bab ini dibahas kepentingan Rusia memveto Resolusi PBB untuk Suriah dilihat dari kepentingan Rusia untuk menjaga pengaruh di Timur Tengah pada umumnya dan di Suriah pada khususnya. Selanjutnya akan dikemukakan kepentingan ekonomi dan militer Rusia di Suriah yang akan terganggu apabila resolusi PBB yang memberi peluang pengerahan pasukan PBB Ke Suriah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.